

LAPORAN KINERJA

Triwulan I



2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

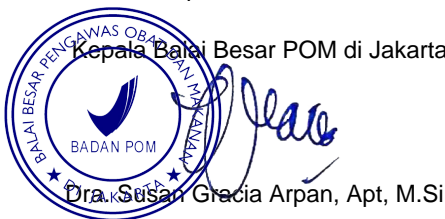
Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2023 (periode renstra 2020-2024), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2023

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis triwulan I pada tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Jakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

1. Sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 101,16%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, belum ada capaian pada triwulan I, nilai akan muncul pada akhir tahun 2023.
3. Sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, belum ada capaian pada triwulan I, nilai akan muncul pada akhir tahun 2023.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 113,43%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
5. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 100,01%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
6. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 185,80%dengan kriteria **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**
7. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 358,30% dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
8. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal”, belum ada capaian pada triwulan I, nilai akan muncul pada akhir tahun 2023.
9. Sasaran strategis “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal” belum ada capaian pada triwulan I, nilai akan muncul pada akhir tahun 2023
10. Sasaran strategis “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”, dengan capaian sebesar 132%dengan kriteria **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**
11. Sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel”, dengan capaian sebesar 83,82%dengan kriteria **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**

HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan **terobosan** di Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dengan Semangat Kolaborasi Amankan Pangan di Jakarta Selama Natal dan Tahun Baru

Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan, BBPOM di Jakarta melakukan pengujian sampel pangan dengan menggunakan rapid test kit Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Berdasarkan hasil pengujian masih ditemukan pangan yang mengandung boraks. Sedangkan terhadap hasil pengawasan terhadap cara peredaran pangan olahan yang baik di retail, ditemukan produk tidak memenuhi ketentuan label. Selanjutnya telah dilakukan tindaklanjut sesuai ketentuan yang berlaku.



Selain pengawasan, pada kegiatan tersebut dilakukan pula kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebaran informasi kepada pengunjung mengenai leaflet 4 Bahan Berbahaya dalam Makanan, Tips Memilih Pangan yang Aman dengan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Ijin Edar dan Kadaluarsa). Pada akhirnya diharapkan masyarakat dapat menjadi konsumen cerdas, selalu menerapkan Cek KLIK.

2. Kerling Jakarta Hadir di Bussines Meeting dan Expo UMKM



Business Meeting & Expo UMKM dibuka oleh Bapak Muhaimin Iskandar yang bertemakan “Kali Ini Kita Buat Lebih Benar”, beliau juga berkesempatan mengunjungi booth layanan Kerling Jakarta Balai Besar POM di Jakarta dan berdiskusi terkait bagaimana tata cara penerbitan Nomor Izin Edar. Disampaikan oleh petugas bahwa Balai Besar POM di Jakarta secara masif melakukan pendampingan bagi para pelaku usaha UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional sebagai dukungan nyata bagi UMKM di mana tahun ini telah diterbitkan 485 NIE bagi UMKM.

Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Susan Gracia Arpan, M.Si., memberikan dukungan bagi terselenggaranya kegiatan ini dengan hadir dan meninjau langsung kegiatan yang juga dimeriahkan dengan hadirnya booth pameran hasil karya UMKM baik berupa kerajinan tangam, pakaian, dan makanan. Diharapkan dengan hadirnya Balai Besar POM di Jakarta, semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usahanya

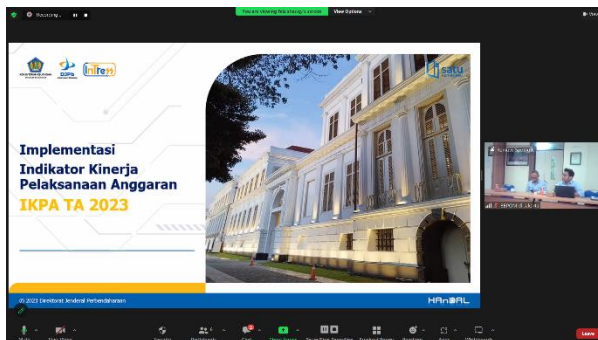
3. Waspada Chikibul – BBPOM di Jakarta Sosialisasikan Pedoman Mitigasi Risiko Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair Pada Pangan Olahan

Kegiatan dibuka oleh Plh Kepala BBPOM di Jakarta, Nurul Hidayah Hadiyati, menyampaikan bahwa sosialisasi pedoman mitigasi risiko ini sebagai panduan penanganan penggunaan bahan penolong nitrogen cair pada pangan olahan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat (konsumen) dan pelaku usaha (food handler, produsen pangan) mengenai potensi risiko nitrogen cair dalam pangan serta dapat sebagai acuan bagi pengawas dan fasilitator keamanan pangan, khususnya pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembinaan kepada pelaku usaha pangan olahan. Harapannya pedoman mitigasi risiko ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi penjaja pangan, konsumen dan pengawas/penyuluh pangan dalam penggunaan nitrogen pada proses pengolahan pangan.

Dengan dilaksanakannya KIE ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya terkait pangan yang disajikan menggunakan Nitrogen cair. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi foodborne diseases maupun kesakitan diri akibat penggunaan ataupun penanganan nitrogen cair yang tidak tepat.

4. Forum Diskusi “Simple Hacks To Achieve IKPA Target” Dalam Rangka Meningkatkan Nilai IKPA Tahun Anggaran 2023

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM di Jakarta) menggelar Focus Group Discussion (FGD) "Simple Hacks to Achieve IKPA Target" bersama KPPN VI Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid, baik offline maupun daring, dengan mengundang narasumber dari KPPN VI Jakarta yaitu Bapak Meda Febriana Aquarez dan Bapak Faiz Akhsan Shauqy.



Kegiatan ini dikemas dengan sistem diskusi dan dilanjutkan dengan paparan “Implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA TA 2023” yang disampaikan langsung oleh pihak KPPN VI Jakarta. Dalam paparannya pihak KPPN VI Jakarta menyampaikan ada 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus pada Reformulasi IKPA Tahun 2023 adalah kualitas perencanaan anggaran (dengan bobot 20%); kualitas pelaksanaan anggaran (dengan bobot 55%); dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (dengan bobot 25%).

Reformulasi Penilaian IKPA Tahun 2023 itu ditujukan untuk mewujudkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik dengan penguatan 8 (delapan) indikator IKPA yaitu revisi DIPA; deviasi Hal III DIPA; penyerapan anggaran; belanja kontraktual; penyelesaian tagihan; pengelolaan UP/TUP; dispensasi SPM; dan capaian output.

5. Pangan Aman, Ramadhan Nyaman: Intensifikasi Pengawasan Takjil Jakarta Pusat

Dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadhan, Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan pengawasan pangan di sentra penjualan takjil di sekitar Masjid Akbar Kemayoran Jakarta Pusat pada Kamis (30/03/2023). Hadir

pada kesempatan tersebut Walikota Jakarta Pusat yang memimpin langsung pelaksanaan kegiatan kolaborasi dimaksud di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat.

Pada kegiatan pengawasan terpadu tersebut, BBPOM di Jakarta melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya menggunakan Rapid Test Kit Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow, guna melindungi masyarakat dari pangan yang berpotensi memiliki bahaya bagi kesehatan. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yang dimaksud.



Selain itu, BBPOM di Jakarta juga melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung kepada masyarakat, membagikan Leaflet antara lain 4 Bahan Berbahaya dalam makanan, Nomor Izin Edar Obat dan Makanan, BPOM Mobile, Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluarsa), Baca Label, dan Lima Kunci Keamanan Pangan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Highlight Kinerja	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xv
Bab I Latar Belakang.....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Isu Strategis.....	3
Bab II Perencanaan Kinerja.....	5
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	5
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun	11
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	14
2.5 Metode Pengukuran	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2 Realisasi Anggaran	93
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan.....	94
Bab 4 Penutup.....	97
4.1 Kesimpulan.....	97
4.2 Saran.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Tugas

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta

1.4. Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

a. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Balai Besar POM di Jakarta per 30 Desember 2022 memiliki 125 PNS dan 18 pramubakti teknis. Jumlah ini masih belum memenuhi standar sesuai Analisis Beban Kerja dan telah dibuatkan perencanaan pemenuhannya sampai dengan tahun 2024.

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di No. hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m² dan luas bangunan 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di No. memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

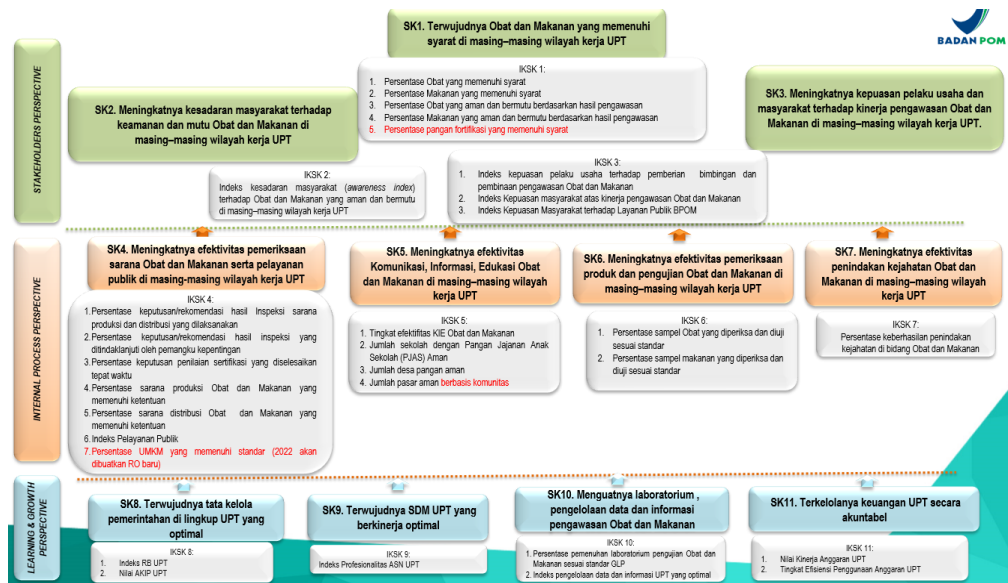
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel berikut.

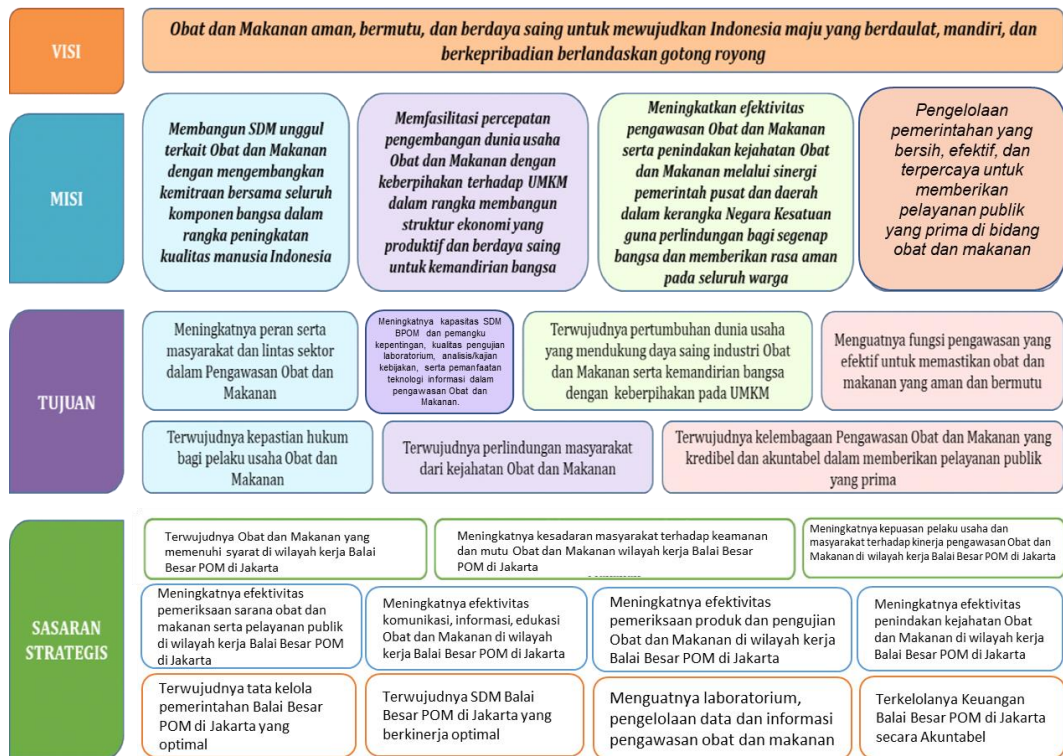
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
Stakeholder							
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Besarnya POM di Jakarta	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,30	4,40	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81
	Internal Process						
	Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	92
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	-	-	-

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020.

Tabel 2. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta TA 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,8
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,33

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	4,4
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makananyang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	84,4
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93,7

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 48,085,117,000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
	02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
	03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
	04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
	05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	89
03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,8
	08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,33
	09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
	11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
	12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
	13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
	14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
	15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,4
	16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8
	18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
	19-Jumlah desa pangan aman	28
	20-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	4
06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	84,4
	25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81
09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,75
10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
	28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,5
11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93,7

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82%	82%	82%	82%	465.152.450
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96%	96%	96%	96%	298.193.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	82%	82%	82%	465.152.450
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84%	84%	84%	84%	298.193.000
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90%	90%	90%	90%	50.898.400
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				89%	318.225.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				88,8%	46.325.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				78,33%	371.262.500
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	92%	92%	92%	92%	82.596.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91%	91%	91%	91%	396.496.750
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82%	82%	82%	82%	396.496.750
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89%	89%	89%	89%	295.830.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65%	65%	65%	65%	160.788.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78%	78%	78%	78%	632.205.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				4,4	371.262.500
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10%	40%	70%	79%	85.159.900
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,8	95,8	95,8	2.603.617.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30% (progress)	70% (progress)	90% (progress)	88	767.240.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah desa pangan aman	25% (progress)	40% (progress)	65% (progress)	28	1.097.149.000
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	25% (progress)	70% (progress)	70% (progress)	4	110.081.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	10%	40%	70%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar				100%	277.407.600
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	30%	45%	61%	1.444.888.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta				84,4%	91.936.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta				81%	54.154.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta				84,75%	27.090.178.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>				87%	6.770.065.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	137.915.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	77	80	86	93,7%	28.600.000

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perhitungan/ pengukuran kinerja perlu dilakukan

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis triwulan I Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA	KESIMPULAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	101,16	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan			
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	113,43	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100,01	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	185,80	Tidak dapat disimpulkan	
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	358,30	Tidak dapat disimpulkan	
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal			
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal			
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	132	Tidak dapat disimpulkan	
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	83,82	Belum Memenuhi Ekspetasi	Kurang Efektif

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut

Tabel 7. Hasil Pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Anggaran	
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi
a	b	c	e	f	$g=f/e*100$	h	k	l
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82,00	90	109,76	Memenuhi Ekspekstasi	455.244.300	51.672.950
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,00	90	93,75	Belum Memenuhi Ekspekstasi	256.188.000	55.306.708
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	82,89	101,09	Memenuhi Ekspekstasi	455.244.300	51.672.950
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	95,56	113,76	Memenuhi Ekspekstasi	256.188.000	55.306.708
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	78,69	87,43	Belum Memenuhi Ekspekstasi	50.338.400	9.739.221
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta					168.065.100	65.510.641
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					43.462.500	3.414.383
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan					196.075.950	93.095.748
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM					3.069.000	650.625
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	89,68	98,55	Belum Memenuhi Ekspekstasi	309.634.250	7.879.352
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82,00	88,35	107,74	Memenuhi Ekspekstasi	316.632.000	14.721.257

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Anggaran	
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi
a	b	c	e	f	$g=f/e*100$	h	k	l
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	90,14	101,28	Memenuhi Ekspektasi	312.063.000	4.518.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	74,58	114,74	Memenuhi Ekspektasi	135.006.000	33.652.515
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	85,42	109,51	Memenuhi Ekspektasi	484.262.500	82.106.189
		Indeks Pelayanan Publik				Memenuhi Ekspektasi	196.075.950	93.095.748
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	24,20	36	148,76	Memenuhi Ekspektasi	63.421.500	6.106.883
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,80	95,85	100,05	Memenuhi Ekspektasi	2.353.862.000	350.893.805
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30,00	30	100	Memenuhi Ekspektasi	720.402.000	75.415.296
		Jumlah desa pangan aman	20,00	20	100	Memenuhi Ekspektasi	1.046.723.000	11.629.690
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00	25	100	Memenuhi Ekspektasi	111.008.100	19.885.560
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	16,99	169,90	Tidak Dapat Disimpulkan	390.209.400	87.148.243
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,17	201,70	Tidak Dapat Disimpulkan	241.164.000	24.988.800
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00	35,83	358,30	Tidak Dapat Disimpulkan	1.267.408.000	125.400.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks RB BBPOM di Jakarta					283.344.000	28.709.958
		Nilai AKIP BBPOM di Jakarta					587.597.000	56.705.519

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Anggaran	
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi
a	b	c	e	f	$g=f/e*100$	h	k	l
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta					164.296.000	13.922.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP					5.551.243.000	558.458.065
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,50	3,3	132,00	Tidak Dapat Disimpulkan	18.234.000	1.532.735
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	77,00	64,54	83,82	Belum Memenuhi Ekspektasi	27.076.660.000	7.045.407.206

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, “**MEMENUHI Ekspektasi**”, 12 (dua belas) indikator mencapai target dengan kategori “**TIDAK MEMENUHI Ekspektasi**”, 4 (empat) indikator mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**” dan 4 (empat) indikator belum dapat dihitung capaiannya karena merupakan indikator yang hanya bisa dihitung pada akhir tahun 2023.

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I*

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82	90	109,76	Memenuhi ekspektasi

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :

No	Kriteria
1	Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2	Produk kadaluarsa
3	Produk rusak
4	Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5	Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil uji dari Balai Penguji untuk poin 5.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian TW I target TW I Tahun 2023*

Realisasi indikator “Persentase Obat yang memenuhi syarat” pada TW I adalah sebesar 90% dengan capaian sebesar yaitu 109.76% termasuk kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 , maka disimpulkan termasuk kategori “efektif”.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan*

Target indikator kinerja TW I tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan untuk di triwulan selanjutnya.

Dari 329 sampel acak yang masuk laboratorium, sudah selesai diuji sebanyak 190 sampel (57.75%), namun yang memenuhi syarat sebesar 171 sampel (90%) dari sampel selesai uji.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pencapaian pernyataan kinerja*

Seluruh intervensi yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta sudah cukup efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase obat yang memenuhi syarat di triwulan I ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di triwulan mendatang.

e. *Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan			Akhir tahun 2023

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan I dengan target TW I*

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan I Tahun 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	90	93,75	Belum Memenuhi Ekspetasi

Yang dimaksud dengan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian capaian TW I target TW I Tahun 2023

Realisasi indikator “Persentase makanan yang memenuhi syarat” pada TW I adalah sebesar 90,0% dengan capaian sebesar yaitu 93,75% termasuk kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 , maka disimpulkan termasuk kategori “kurang efektif” sehingga diperlukan evaluasi dan monitoring realisasi capaian pada triwulan selanjutnya dan capaian tahun 2024

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum tercapainya target indikator kinerja TW I tahun 2023 dipengaruhi oleh banyaknya sampel acak yang tidak memenuhi persyaratan uji laboratorium dan ketentuan penandaan, sehingga menyebabkan persentase makanan yang memenuhi syarat tidak mencapai target. Dari 100 sampel acak yang selesai uji di laboratorium, sebanyak 90 sampel memenuhi syarat, terdapat 4 sampel tidak memenuhi syarat uji kimia dan 2 sampel tidak memenuhi syarat uji mikrobiologi serta 4 sampel tidak memenuhi syarat penandaan. Sampel yang tidak memenuhi syarat uji kimia adalah sampel manisan (TMS benzoate, sakarin dan siklamat), sampel yang tidak memenuhi syarat uji mikrobiologi adalah 2 sampel keripik (TMS Ak. Enterobacteriaceae) dan sampel yang tidak memenuhi syarat penandaan adalah sampel roti manis (TMK Mayor).

Banyaknya produk manisan buah yang tidak memenuhi syarat di peredaran memerlukan pengawasan khusus agar tidak ada lagi produk yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat karena di tahun 2022 produk manisan buah tidak memenuhi syarat juga beredar.

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu
- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta guna memberdayakan masyarakat agar cerdas dalam memilih produk yang berkualitas dan aman bagi kesehatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pernyataan kinerja.

Kegiatan pengawasan, penyidikan, KIE serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada butir b di atas jika dilaksanakan secara maksimal dan terus menerus akan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Namun jika pelaksanaannya kurang intensif, dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan dan Infokom terkait dengan temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.		Melakukan koordinasi dengan Poksi Pemeriksaan dan Infokom	Akhir tahun 2023
2	Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK.		Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK.	Akhir tahun 2023

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Matriks Perbandingan perbandingan realisasi, capaian, dan target TW I Tahun 2023

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82,89	101,09	Memenuhi ekspektasi

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian TW I dengan target TW I Tahun 2023

Pada indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” pada TW I ini realisasi indikator adalah 82.89% dengan capaian TW I adalah 101.09% termasuk kriteria “Memenuhi Ekspetasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 dengan capaian, termasuk kategori “Efektif”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target indikator kinerja TW I tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan untuk di triwulan selanjutnya.

Dari 134 sampel targeted yang masuk laboratorium, sudah selesai diuji sebanyak 76 sampel (56.72%), namun yang memenuhi syarat sebesar 63 sampel (82.89%) dari sampel selesai uji.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seluruh intervensi yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta sudah cukup efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase obat yang memenuhi syarat di triwulan I ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di triwulan mendatang.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023
3	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Dilakukan pendampingan pre market terhadap UMKM produksi Kosmetik	Akhir tahun 2023

4. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**

a. **Matriks Perbandingan Realisasi, Capaian, dan Target TW I Tahun 2023**

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	95,56	113,76	Memenuhi Ekspektasi

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. **Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.**

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil dari Balai Penguji untuk memperoleh poin d.5.
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV tahun 2022

Realisasi indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” pada TW I adalah 95,56% dengan capaian sebesar yaitu 113,76% termasuk kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, termasuk kategori “Efektif” sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi untuk mempertahankan capaian pada triwulan selanjutnya dan tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020 dan masih digunakan di tahun 2023. Data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir dari pengujian mutu sampel targeted.

Persentase Capaian makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 113,76% diatas target TW I yang ditetapkan yaitu 84 % dengan kriteria “Efektif”.

Pada triwulan I Laboratorium pangan selain sampel pangan rutin menerima sampel kasus minuman siap saji kekinian dan sampel kasus gagal ginjal akut dan total jumlah sampel pangan targeted yang masuk ke laboratorium berjumlah 60 sampel. Sebanyak 45 sampel telah selesai proses pengujian dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 43 sampel (95,56 %) dan 2 sampel (4,44%) tidak memenuhi syarat. Sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu sampel air (1 sampel TMS Angka Coliform dan Ph serta 1 sampel TMS Ph).

Sesuai dengan wacana BPOM untuk melakukan kajian keamanan yang berkaitan dengan kandungan Gula Garam Lemak (GGL) pada minuman kekinian, laboratorium menerima sebanyak 17 sampel minuman kekinian. Minuman kekinian ini mengandung gula yang cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan dampak Kesehatan berupa penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus, penyakit kardiovaskuler dan obesitas sehingga peredarannya harus diawasi.

Selain sampel kasus minuman siap saji kekinian, laboratorium pangan juga menerima sampel target kasus gagal ginjal akut (GGA) sejumlah 25 sampel. Adapun sampel yang disampling berupa M-PASI siap saji dan air yang dikonsumsi. Parameter uji kimia yang diperiksa meliputi penetapan kadar EG-DEG dan cemaran logam. Banyaknya sampel target kasus yang masuk di laboratorium pangan turut mempengaruhi meningkatnya realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Proses / Teknik sampling dan kondisi di sarana distribusi dan produsen juga mempengaruhi hasil pengujian di laboratorium. Pada Implementasi Regionalisasi di tahun 2022, Balai Besar POM di Jakarta laboratorium pangan dan bahan berbahaya ditunjuk sebagai Laboratorium Air dan Laboratorium spesifik Mikotoksin. Program perencanaan pengadaan alat, verifikasi metoda Analisa, bimbingan teknis internal dan eksternal, magang dan peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium yang terkait dengan pengujian Regionalisasi menjadi perhatian khusus. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut meningkatkan cost/ biaya yang dikeluarkan dalam pembelian suku cadang, reagent, dan alat dalam jumlah banyak, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih baik.

Pada TW I sampel targeted kasus yang merupakan wacana dari BPOM yang masuk ke laboratorium sangat mempengaruhi dalam memprediksi time line pengujian. Waktu terima, waktu penyelesaian dan jumlah sampel yang cukup banyak mempengaruhi dalam proses pengujian sampel yang telah direncanakan sebelumnya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023
3	Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB),	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Pemdampingan dan pengawasan UMKM Pangan	Akhir tahun 2023
4	Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Bimtek Pengawasan Iklan dan penandaan	Akhir tahun 2023

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. *Matriks Perbandingan Realisasi, Capaian, dan Target TW I Tahun 2023*

Tabel 12. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	77,05	85,61	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar KIO₃, NaCl, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar KIO₃ sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS.

Persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

b. Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Capaian TW I target TW I Tahun 2023

Realisasi indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” pada TW I adalah 77,05 % dengan capaian sebesar yaitu 85,61% termasuk kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, maka termasuk kategori “kurang efektif” sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada triwulan selanjutnya dan tahun 2023..

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Pada tahun 2021 ini, IKU “Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” merupakan tambahan IKS 1 dari SK1 (Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat), dengan memisahkan pangan fortifikasi dari IKU “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”. Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2022 menurun secara signifikan terhadap target yang ditetapkan dan mempengaruhi capaian pangan fortifikasi sehingga masuk dalam kriteria “kurang efektif”.
2. Pada triwulan 1 tahun jumlah sampel Pangan Fortifikasi yang masuk laboratorium sebanyak 73 sampel dan sebanyak 61 sampel telah selesai uji. Dari 61 sampel yang telah selesai proses pengujian, sampel yang memenuhi syarat berjumlah 48 sampel (78,68%) dan 13 sampel (21,31%) tidak memenuhi syarat. Sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu 8 sampel garam dengan rincian 3 sampel tms KIO3 dan 5 sampel tms KIO3 dan kadar air. Sedangkan untuk sampel terigu terdapat 5 sampel yang TMS Vit B2.
3. Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat. Beberapa hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain:

Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

a. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi dengan peningkatan kompetensi dan metode uji ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak eksternal. Pada tahun 2022 mulai digunakan metode uji identifikasi Fe elektrolitik (FeO) sebagai skrining awal untuk mendeteksi Fe elektrolit yang tidak boleh terkandung dalam pangan fortifikasi tepung terigu.

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi garam juga ditingkatkan dengan mulai menggunakan metode uji potensiometri yang lebih akurat dibandingkan metode titrimetric secara manual.

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kemampuan uji sampel fortifikasi	Sudah dilaksanakan	uji skrining awal Fe elektrolitik dan penggunaan potensiometri untuk penetapan kadar NaCl dalam garam.	Akhir tahun 2023
2	Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023
3.	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Sudah dilaksanakan, namun perlu lebih diintensifkan	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Akhir tahun 2023

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

a. Matriks perbandingan realisasi triwulan I dengan target TW I 2023

Tabel 13. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TWI	Realisasi TWI	Capaian TWI	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) dalam memilih Obat dan Makanan. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya, dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produk aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PAKOM) dengan metode dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup

pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

b. Perbandingan realisasi TW I dengan target triwulan I tahun 2023

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan I masih belum dapat dihitung dikarenakan merupakan indeks yang baru dapat dihitung pada akhir tahun.

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I dengan realisasi TW I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan pelaku usaha adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2021.

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang diukur tahunan, sehingga realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung.

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi TW I tahun 2023*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah hasil pengukuran dari survei berupa angka dari hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan termasuk produk layanan yang diawasi BPOM. Indikator pembentuk terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu: (1) Reliability, kemampuan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Assurance, kemampuan memberikan perlindungan; (3) Tangible, layanan informasi tentang keamanan produk; (4) Empathy, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman; (5) Responsiveness, tindakan atas produk berbahaya. Lingkup pertanyaan kuesioner kepuasan masyarakat meliputi kepuasan terhadap kinerja dan layanan BPOM serta pertanyaan tambahan terkait Covid-19.

Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 10%. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang diukur tahunan, sehingga realisasi dan capaian triwulan I tahun 2023 belum dapat dihitung.

9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target triwulan I tahun 2023*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% terhadap responden yaitu Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun.

b. Perbandingan realisasi TW I dengan target tahun 2023

Indeks Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diukur secara tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2023 realisasi dan capaian belum dapat dihitung.

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2023

Tabel 17. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	89,68	98,55	Belum Memenuhi Ekspetasi

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain, Pelaku usaha dan Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$. Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain. Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

b. Perbandingan Capaian Target dan Realisasi TW IV dengan target tahun 2022

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2023 Triwulan I belum mencapai target yang ditetapkan, realisasi 89,68 dari target 91 sehingga capaian 98,55% terhadap target sehingga masuk dalam kriteria BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

- Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan, sudah sesuai timeline yang ditetapkan.
- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan sudah sesuai.
- Kecepatan respon dari Pusat terhadap rekomendasi dari BBPOM di Jakarta sudah meningkat karena BBPOM di Jakarta aktif melakukan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindaklanjut dari rekomendasi Balai maupun Laporan dari Balai

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/ belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta
- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya.

- Diperlukannya monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

BBPOM di Jakarta aktif melakukan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindak lanjut dari rekomendasi Balai maupun Laporan

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2023

Tabel 18. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	88,35	107,74	Memenuhi Ekspetasi

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha;
- 2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$
$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepalalintas sektor}} \times 100\%$$

b. *Perbandingan realisasi dan capaian TW IV dengan target tahun 2022*

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 88,35% sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 82%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 107,74% dengan kriteria “MEMENUHII EKSPEKTASI”.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan*

Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah mencapai target. Hal ini berarti sudah terpenuhinya respon dari pelaku usaha dan lintas sektor terhadap rekomendasi dan surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh BBPOM Jakarta.

Pelaku usaha sudah menindaklanjuti keputusan/rekomendasi dari BBPOM Jakarta dengan mengirim bukti tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan sesuai time line yang ditetapkan.

Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait menggunakan aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta, tetapi aplikasi ini harus diapprove BPOM Pusat sehingga diperlukan koordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan agar secepatnya melakukan pembinaan terhadap sarana PIRT yang melanggar.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Target tercapai karena koordinasi lintas sektor sudah berjalan baik dan dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan sarana distribusi di wilayah DKI Jakarta.

e. *Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya*

BBPOM Jakarta tetap perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait pengawasan sarana IRTP dan mengirimkan surat permintaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan IRTP kepada Suku Dinas Kesehatan terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha di bidang obat dan makanan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku

12. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

a. ***Perbandingan Realisasi, Capaian, dan Target TW I Tahun 2023***

Tabel 19. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	89,68	98,55	Belum Memenuhi Ekspetasi

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT SK
- (7) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

b. ***Perbandingan Realisasi dan Capaian TW I target TW I Tahun 2023***

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan triwulan satu tahun 2023 sebesar 90,14 % dari target yang ditetapkan 89 %, jika dihitung terhadap target capaian sampai triwulan satu tahun 2023 sebesar 101,28 % dengan kriteria " efektif".

Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan satu 2023 sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima). Sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) merupakan keputusan dari permohonan yang diterima pada tahun 2023 dan 40 (empat puluh) merupakan keputusan

dari permohonan tahun sebelumnya. Dari 265 (dua ratus enam puluh lima) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) keputusan memenuhi timeline yang telah ditetapkan dan 1 (satu) keputusan sertifikasi tidak tepat waktu. Permohonan yang diterima sampai triwulan satu tahun 2023 sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga)

Adapun jumlah permohonan pengujian sampel sampai triwulan satu tahun 2023 sebanyak satu dan dapat diselesaikan tepat waktu

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2022 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain:

- a. Balai Besar POM di Jakarta telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi petugas Balai Besar POM di Jakarta dengan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persamaan persepsi diantara petugas Balai Besar POM di Jakarta
- b. Fasilitasi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika dapat meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM membuat proses sertifikasi pada UMKM lebih cepat.
- c. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Selain *Desk CAPA* dalam rangka pelayanan prima BBPOM di Jakarta juga menyelenggarakan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen Izin Penerapan CPPOB. Dengan diadakan pelayanan ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih paham terkait dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Izin Penerapan CPPOB. Pelaksanaan desk CAPA dan desk CPPOB diselenggarakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan. Desk CAPA dan desk CPPOB sampai dengan triwulan satu 2022 telah diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2023 yang diselenggarakan secara luring.
- d. Desk CAPA juga diselenggarakan bagi PBF karena adanya peraturan untuk proses sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) bahwa setelah dilakukan audit hanya diberi kesempatan perbaikan

sebanyak maksimal dua kali dengan tenggang waktu masing-masing 40 hari kerja yang semula hanya dibatasi selama 12 bulan semua ketidaksesuaian harus telah diselesaikan oleh pelaku usaha yang berlaku mulai tahun 2023. Untuk mempercepat pemenuhan penyelesaian CAPA maka BBPOM di Jakarta mengupayakan dilakukan desk CAPA baik secara bersamaan dengan desk CAPA yang terjadwal ataupun dilakukan secara sendiri oleh petugas. Di samping itu pelayanan prima dalam bentuk Desk CAPA dan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen izin penerapan CPPOB BBPOM di Jakarta dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan melaksanakan desk registrasi bagi pelaku usaha UMKM pangan yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun yang telah memiliki izin penerapan CPPOB. Pada dengan triwulan satu 2023 desk registrasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) secara luring di BBPOM di Jakarta

Tanggal kegiatan	Jumlah pelaku usaha	Jumlah NIE yang terbit
21 – 22 Februari 2023	48	32
29 – 30 Maret 2023	46	33

- e. Kegiatan Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BBPOM di Jakarta (Kerling Jakarta) yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk meningkatkan persentase proses yang tepat waktu. Adapun pelaksanaan kerling pada triwulan pertama 2023 diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2023 di UP PMPTSP Kecamatan Jatinegara
- f. Sultan Betawi yaitu loket Balai Besar POM di Jakarta pada Mall Pelayanan Publik. Dengan hadirnya BBPOM di Jakarta di Mall Pelayanan Publik, pelaku usaha yang akan berkonsultasi tidak harus ke Balai Besar POM di Jakarta
- g. Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun sistem monitoring melalui spread sheet untuk memantau permohonan yang masuk sampai dengan diterbitkannya rekomendasi oleh Balai Besar POM di Jakarta sehingga kinerja disetiap tahapan dapat terukur.

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

- Sebagian sebagian sarana terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
- Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha
- Data perusahaan pada OSS terutama nomor telepon sering tidak dapat dihubungi sehingga menyulitkan komunikasi dalam rangka konfirmasi jadwal audit

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Akan terus dilakukan program desk CAPA maupun diskusi perbaikan dokumen persyaratab CPPOB yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA

Untuk mempercepat proses registrasi pangan olahan bagi UMKM yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun izin penerapan CPPOB maka diskusi terkait proses registrasi pangan olahan akan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan sharing knowledge antara petugas di Kelompok substansi Pemeriksaan dan Kelompok substansi Infokom

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka program kerling dan pelayanan di Mal Pelayanan Publik akan terus dilakukan

13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2023*

Tabel 20. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	74,58	114,74	Memenuhi Ekspetasi

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.

- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tw I tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta yaitu 74,58%, melebihi target 65 dengan capaian 114, 73% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tabel 21. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan TW I tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	3	2	1
2.	Fasilitas Bahan Baku	0	0	0
3.	Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	2	1	1
4.	Industri Obat Tradisional (IOT)	2	2	0
5.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
6.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	3	2	1
7.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0
8.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	1	1	0
9.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
11.	Industri Kosmetik	9	8	1
12.	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0
13.	Industri Pangan	31	20	11

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
14.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	8	8	0
TOTAL		59	44	15

Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan melebihi target karena sebagian besar sarana yang diperiksa sudah memenuhi ketentuan. Sarana produksi obat dan makanan yang telah diperiksa sebanyak 59 sarana, dengan hasil 44 sarana diantaranya Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan sarana produksi paling banyak pada Triwulan 1 adalah Industri Pangan dengan hasil sebanyak 65% (20 dari 31 sarana) Memenuhi Ketentuan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya simplifikasi form pemeriksaan sarana produksi pangan yaitu penghapusan pemeriksaan aspek yang berulang pada beberapa poin dan adanya kebijakan pemenuhan syarat minimal pada beberapa aspek untuk UMKM Pangan sehingga persentase tingkat kepatuhan sarana meningkat. Pemeriksaan sarana masih akan dilaksanakan sampai akhir tahun sesuai dengan target sarana produksi yaitu 296 sarana produksi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan inspektur GMP. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- *Desk CAPA (corrective action preventive action)* atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi TW I tahun 2023*

Tabel 21. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	85,42	109,51	Memenuhi Ekspetasi

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target 2023

Realisasi Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta yaitu 85,42%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 78% sehingga capaian 109,51% dengan kriteria "MEMENUHI EKSPEKTASI".

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	34	27	7
2.	Apotek	53	46	7
3.	Toko Obat	9	9	0
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	0	0	0
5.	Rumah Sakit (RS)	9	9	0

6.	Puskemas	33	33	0
7.	Klinik	21	16	5
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	1	1	0
9.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0
10.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	56	48	8
11.	Fasilitas Distribusi Suplemen	29	29	0
12.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	63	55	8
13.	Klinik Kecantikan	0	0	0
14.	Fasilitas Distribusi Pangan	121	92	29
TOTAL		439	375	64

Realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan melebihi target karena sebagian besar sarana yang diperiksa sudah memenuhi ketentuan. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat

PBF harus memiliki sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga wajib menerapkan CDOB sebelum beroperasi

Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance)

Sarana distribusi obat dan makanan yang telah diperiksa sebanyak 439 sarana, dengan hasil 375 sarana Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi paling banyak pada Triwulan 1 adalah distribusi Pangan dengan jumlah 121 sarana.

Sarana distribusi paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan adalah sarana distribusi pangan. Hal ini merupakan kolaborasi pemeriksaan antara substansi pemeriksaan adan penindakan dimana sarana yang diperiksa merupakan sarana yang diduga melakukan tidak pidana di bidang obat dan makanan. Selain itu, pada bulan maret terdapat program intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya Lebaran sehingga banyak ditemukan produk pangan tanpa izin edar. Pemeriksaan sarana masih akan dilaksanakan sampai akhir tahun sesuai dengan target sarana produksi yaitu 1070 sarana distribusi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain:

Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.

Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.

15. **Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta.**

a. **Perbandingan target triwulan I dengan target TW I Tahun 2023**

Tabel 22. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks Pelayanan Publik	-	4,3	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

b. **Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2023**

Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator tahunan yang diambil dari penilaian UPP BPOM yang akan ditetapkan pada akhir tahun 2022, sehingga pada triwulan I tahun 2023 ini belum ada realisasi dan capaian.

16. **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

a. **Perbandingan target triwulan I dengan Realisasi TW I**

Tabel 24. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	24,2	36	148,76	Tidak Dapat Disimpulkan

Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW III dengan target tahun 2022

Target triwulan satu dihitung dari rata-rata target pendampingan UMKM Obat Tradisional, UMKM Kosmetika dan UMKM pangan olahan. Adapun target realisasi pendampingan UMKM obat tradisional sampai triwulan 1 sebesar 20 % berupa kegiatan penetapan target dan bimtek, target realisasi pendampingan UMKM kosmetika sebesar 50 % berupa penetapan target dan bimtek, target realisasi pendampingan UMKM pangan olahan sebesar 10 % berupa penetapan target. Sehingga jika rata-rata dari ketiga jenis sarana maka target triwulan satu adalah sebesar 26,67 %

Capaian juga diperhitungkan dari rata-rata masing-masing capaian pendampingan masing-masing sarana. Pada triwulan satu untuk pendampingan UMKM kosmetik telah dilakukan penetapan target dan bimtek, untuk UMKM Obat tradisional telah dilakukan penetapan target, sedangkan pendampingan UMKM pangan olahan telah dilakukan penetapan target dan bimtek.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

- Dengan berakhirnya masa pandemic Covid-19 di mana pemerintah telah melakukan pelonggaraan terhadap kegiatan masyarakat maka tahun 2023 visitasi terhadap calon UMKM yang akan diikuti sertakan pada program fasilitasi terlebih dahulu dapat dilakukan untuk pemastian sarana dan prasarana sebelum dilakukan penetapan UMKM yang akan ikut program fasilitasi
- Pelatihan bagi fasilitator Balai Besar POM di Jakarta yang tidak tepat waktu oleh Pusat sehingga waktu pelaksanaan Bimtek di Balai bagi pelaku usaha mengalami penundaan waktu
- Terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta. Pada tahun 2023 BBPOM di Jakarta melakukan kolaborasi untuk fasilitasi UMKM pangan olahan dengan Dinas PPKUKM dengan melibatkan para pendamping dari Dinas PPKUKM yang telah dilatih pada tahun sebelumnya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada fasilitasi tahun 2023
- Melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada fasilitasi tahun 2023 baik UMKM yang akan didampingi secara langsung oleh BBPOM di Jakarta dengan dibantu oleh fasilitator eksternal, maupun yang akan didampingi oleh pendamping dari Dinas PPKUKM. Bimtek untuk pelaku usaha pangan olahan yang akan didampingi langsung oleh BBPOM di Jakarta telah diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2023 dan bimtek bagi pelaku usaha pangan olahan yang akan didampingi oleh pendamping dari Dinas PPKUKM telah dimulai di wilayah Jakarta Timur pada tanggal 20, 21 dan 24 Maret 2023. Sedangkan bimtek untuk pelaku usaha di bidang kosmetik diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2023. Dengan adanya bimtek tersebut diharapkan pelaku usaha lebih memahami pentingnya dan cara melakukan produksi yang baik dan memiliki komitmen untuk melakukan produksi dengan cara yang baik secara konsisten
- Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha

mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan berskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Dinas PPKUM melakukan kunjungan untuk melakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang memungkinkan untuk difasilitasi dalam waktu dekat. Kunjungan bertujuan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam mempersiapkan tempat produksi sehingga diharapkan fasilitasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran

Balai Besar POM di Jakarta mengadakan pelatihan fasilitator UMKM yang berasal dari personil Jakpener dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam membantu pelaku usaha dalam menerapkan sistem CPPOB sehingga pelaku usaha dapat segera memperoleh izin penerapan CPPOB sebagai persyaratan pembuatan akun perusahaan pada sistem sertifikasi produk pangan Badan POM

Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan realisasi TW I dengan target TW I

Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,85	100,05	Memenuhi Ekspetasi

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan III tahun 2022 diperoleh nilai sebesar **94,93 (Sangat Efektif)** dan telah melampaui target triwulan III sebesar **94,4** dengan capaian sebesar **100,56%, kriteria kinerja Efektif**. Nilai ini diperoleh dari 457 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan sampai dengan periode triwulan III tahun 2022.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

<i>Skor Indeks 100</i>	<i>Interpretasi Efektivitas</i>
<i><65,00</i>	<i>Kurang Efektif</i>
<i>65,01-75,00</i>	<i>Cukup Efektif</i>
<i>75,01-85,00</i>	<i>Efektif</i>
<i>85,01-95,00</i>	<i>Sangat Efektif</i>
<i>95,01-100</i>	<i>Sangat Efektif Sekali</i>

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 95,85 (Sangat Efektif Sekali) dan telah melampaui target triwulan I sebesar 95,8 dengan capaian sebesar 100,05%, kriteria Memenuhi ekspektasi. Nilai ini diperoleh dari 125 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan pada periode triwulan I 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tw I tahun 2023

Relisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta triwulan I tahun 2023 diperoleh sebesar 95,85 (Sangat Efektif Sekali). Apabila dibandingkan dengan target 2023 sebesar 95,8, nilai realisasi telah melampaui target dengan capaian sebesar 100,05% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, BBPOM di Jakarta Triwulan II tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta Triwulan I tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.
2. Adanya perkuatan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan KIE Obat dan Makanan dengan stakeholder terkait seperti Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, OPD, dan media.
3. Terselenggaranya kegiatan KIE berupa Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, secara tatap muka sebanyak 1 (satu) titik di Wilayah DKI Jakarta dengan total peserta sebanyak 500 orang, Sosialisasi Pedoman Mitigasi Risiko sebagai Panduan Penanganan Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair Pada Pangan Olahan melalui Zoom Meeting secara daring yang diikuti oleh 125 orang serta KIE melalui Operasioal Mobil Laboratorium Keliling ke sekolah, pasar serta dalam rangka pengawasan pangan takjil di bulan Ramadhan.
4. Narasumber BBPOM di Jakarta pada berbagai kegiatan dengan stakeholder, misalnya Penyuluhan Keamanan Pangan bertujuan memberikan bimbingan teknis mengenai Cara Produksi Pangan Olahan

yang Baik (CPPOB), keamanan pangan serta label pangan kepada pelaku usaha pangan dan masyarakat.

5. Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.

Untuk menyempurnakan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilakukan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan indikator tingkat minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan, dapat dilakukan upaya penganeekaragaman media penyampaian KIE seperti media cetak, media elektronik (radio, iklan layanan masyarakat di televisi, videotron), dan media social, memperbanyak topik atau tema KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat mencakup lingkup usia dan gender.
2. Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan melalui kegiatan Bimbingan Teknis pada program intervensi PJAS aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Berbasis Komunitas untuk meningkatkan efektivitas penyampaian KIE Obat dan Makanan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan I tahun 2023 ini antara lain:

1. Metode KIE secara tatap muka yang dinilai efektif dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat serta meningkatkan pula keterlibatan dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Obat dan Makanan Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat
2. Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat.
3. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, dan Twitter).
4. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui layanan ULPK, media sosial dan sms blast

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Untuk meningkatkan indikator tingkat minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan, dapat dilakukan upaya penganeekaragaman media penyampaian KIE seperti media cetak, media elektronik (radio, iklan	Implementasi kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Sosialisasi Pedoman Mitigasi Risiko sebagai Panduan Penanganan Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair Pada Pangan Olahan, Sosialisasi melalui media sosial melalui ARIPIN dan Kosidah Jakarta		

	layanan masyarakat di televisi, videotron), dan media social, memperbanyak topik atau tema KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	dengan muatan materi yang berbeda-beda sesuai agenda setting BPOM serta kuis sehingga konten informasi tidak monoton dan dapat meningkatkan minat masyarakat.		
2	Peningkatan strategi pelaksanaan KIE dengan lebih mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan, dan cakupan wilayah.	Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan sesuai kerangka perspektif Gender.		

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. *Perbandingan target dan realisasi TW I dengan target TW I*

Tabel 25. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30	30	100	Memenuhi Ekspetasi

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, dan sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan,

sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tw I tahun 2023

Realisasi progress tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 30% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 16 Maret 2023 serta Sosialisasi Keamanan Pangan yang perencanaan dan pelaksanaannya telah dilaksanakan pada mulai Maret 2023. Target progress capaian tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan I tahun 2022 adalah 30%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan capaian program intervensi PJAS pada Triwulan I ini yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan adanya sinergisme dan dukungan ini, penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

Sebagai rekomendasi pelaksanaan program intervensi PJAS aman pada periode selanjutnya ialah dapat dilakukan perkuatan sinergi dengan pemerintah daerah, sekolah-sekolah lokus intervensi untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah melalui forum komunikasi menggunakan Whatsapp dan tatap muka

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagai mitigasi risiko pencapaian kinerja di periode mendatang, telah dilakukan upaya peningkatan koordinasi melalui kegiatan Audiensi dengan lintas sektor terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara serta Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perkuatan sinergi dengan pemerintah daerah lokus intervensi selanjutnya melalui kegiatan Audiensi dan Advokasi dengan	Telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan program intervensi PJAS aman di Kota Administrasi Jakarta Utara serta		

	menjabarkan kriteria sekolah untuk intervensi PJAS serta program lintas sektor yang dapat diintegrasikan	telah diperoleh program lintas sektor yang dapat diintegrasikan.		
--	--	--	--	--

19. Jumlah desa pangan aman

a. *Perbandingan target dan realisasi TW I dengan target TW I*

Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah desa pangan aman	20	20	100	Memenuhi Ekspetasi

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

b. *Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2023*

Realisasi progress tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan I tahun 2023 ialah sebesar 20% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 16 Maret 2023. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah mencapai target Triwulan I yaitu 20% dengan capaian 100,00% kriteria Memenuhi ekspektasi.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan*

Penyebab keberhasilan capaian program Desa Pangan Aman pada Triwulan I ini yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan adanya sinergisme dan dukungan ini, penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

Sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan pencapaian kinerja program Desa Pangan Aman di periode selanjutnya dapat dilakukan komunikasi terus-menerus dan sinergi yang baik dengan kelurahan yang diinterveni program Desa Pangan Aman melalui forum komunikasi Whatsapp sehingga pelaksanaan tahapan

program sesuai dengan perencanaan. Koordinasi kepada kelurahan yang diintervensi dilakukan dalam rangka pembentukan Tim, Kader, dan Komunitas Kelurahan sebagai sasaran intervensi program Desa Pangan Aman sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan kerangka acuan kerja.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah adanya koordinasi dan sinergitas dengan kegiatan lintas sektor terutama program yang ada di kelurahan terkait keamanan pangan sehingga pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman dapat diintegrasikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. Adanya sinergitas ini dimulai melalui forum Advokasi Kelembagaan Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan Program PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perkuatan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai lokus intervensi melalui Audiensi dan Advokasi serta melibatkan OPD terkait keamanan pangan, mengingat program Desa Pangan ini merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan berbagai lintas sektor, seperti Sudinkes, Sudin PPKUKM, Sudin KPKP, dan Sudindik	Telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan program intervensi Desa Pangan Aman di Kota Administrasi Jakarta Utara serta telah diperoleh program lintas sektor yang dapat diintegrasikan.		
2	Pemantauan terhadap rencana aksi yang telah disusun kelurahan intervensi sebagai monitoring dalam kegiatan pengawasan		Pengawasan Desa Pangan Aman yang telah diintervensi tahun sebelumnya	Triwulan II-IV

20. Jumlah pasar aman pangan berbasis komunitas

a. Perbandingan realisasi triwulan I dengan target TW I

Tabel 27. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25	25	100	Memenuhi Ekspetasi

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas

pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada monev Tahap 1 dibandingkan tahap 2

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ialah 3 (tiga) pasar yaitu 1 pasar intervensi baru dan 2 pasar pengawalan intervensi tahun 2020-2021.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW I dengan target tahun 2023

Realisasi progress tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I tahun 2023 ialah sebesar 25% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Desa Pangan Aman pada 16 Maret 2023 serta telah terselenggaranya Survei Pasar pada Januari 2023. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai target Triwulan I yaitu 25% dengan capaian 100,00% kriteria Memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan progress intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas antara lain adanya kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kegiatan sesuai rencana serta adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

Sebagai rekomendasi perbaikan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya yaitu intensifikasi komunikasi dengan petugas pengelola pasar dalam pelaksanaan bimtek pengelola pasar, sampling, penyuluhan, dan kampanye agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan kerangka acuan kerja.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media Whatsapp sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu. Kegiatan survei pasar yang dilakukan sebelum pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya dan mengidentifikasi pedagang pasar serta inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam pelaksanaan tahapan intervensi selanjutnya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaksanaan audiensi dan advokasi dengan Pemerintah Daerah lokus intervensi dan Perumda Pasar Jaya untuk menentukan pasar interevensi yang sesuai kriteria sehingga dapat dilakukan kegiatan surevi pasar yang memadai.	Telah dilaksanakan audiensi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektoe terkait dalam rangka pelaksanaan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kota Administrasi Jakarta Utara		

Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan Realisasi, Capaian, dan Target TW I Tahun 2023*

Tabel 29. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TWI	Realisasi TWI	Capaian TWI	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	16,99	169,9	Tidak dapat disimpulkan

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian TW I target TW I Tahun 2023

Target indikator "Persentase persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" pada TW I ini adalah 10% dengan realisasi indikator pada TW I sebesar 16.99%, capaiannya yaitu 169.9% termasuk kriteria "Tidak dapat disimpulkan".

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tingginya capaian indikator kinerja Triwulan I tahun 2023 tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah sampel mulai tahun 2023 terkait dengan penerapan Regionalisasi Laboratorium. Penambahan jumlah sampel dalam rangka regionalisasi laboratorium ini belum diperhitungkan secara pasti dalam penetapan target bulanan tahun 2023 (penetapan target dilakukan sebelum target sampel regionalisasi ditetapkan). Sampel regional diterima dari BBPOM Bandung, BBPOM Serang, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai tersebut.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan namun harus terus ditingkatkan	penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Sudah dilaksanakan namun harus terus ditingkatkan	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Akhir tahun 2023

22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target TW I Tahun 2023

Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20,17	202,09	Tidak dapat disimpulkan

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.

Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota) Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	=	$\frac{A + B}{2}$
A	=	$\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan satu tahun}} \times 100\%$
B	=	$\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}} \times 100\%$

Catatan :

Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :

- a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
- b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling

Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :

- a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).

- b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian TW I target tahun 2023*

Target indikator "Persentase persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" pada TW I ini adalah 10% dengan realisasi indikator pada TW I sebesar 16.99%, capaiannya yaitu 169.9% termasuk kriteria "Tidak dapat disimpulkan".

c. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan*

Tingginya capaian indikator kinerja Triwulan I tahun 2023 tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah sampel mulai tahun 2023 terkait dengan penerapan Regionalisasi Laboratorium. Penambahan jumlah sampel dalam rangka regionalisasi laboratorium ini belum diperhitungkan secara pasti dalam penetapan target bulanan tahun 2023 (penetapan target dilakukan sebelum target sampel regionalisasi ditetapkan). Sampel regional diterima dari BBPOM Bandung, BBPOM Serang, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai tersebut.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- a) Menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- b) Melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
- c) Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- d) Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- e) Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- f) Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian

e. *Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan namun harus terus ditingkatkan	penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Sudah dilaksanakan namun harus terus ditingkatkan	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Akhir tahun 2023

Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target TW I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	20,17	202,09	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 30. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan:

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Capaian persentase keberhasilan Penindakan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode triwulan pertama atau Januari - Maret 2023 adalah **tidak dapat disimpulkan**. Hasil ini diperoleh berdasarkan perbandingan realisasi terhadap target triwulan ini yang mencapai 35,83 atau **358,30%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Tim Kerja Penindakan BBPOM di Jakarta **telah berhasil** memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I dengan target tahun 2023

Target indikator “**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**” pada triwulan I tahun 2023 ini adalah 10, sementara target tahun 2023 secara keseluruhan adalah 61. Perbandingan realisasi triwulan pertama dengan target indikator tahun 2023 adalah 58,73%. Jika disimpulkan sesuai dengan SK KaBPOM terbaru No. 128 Tahun 2022 termasuk kategori “**Efektif**”.

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada triwulan pertama untuk periode tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2021, 2022, dan 2023 ditunjukkan dalam tabel sesuai gambar 22 berikut. Terdapat kenaikan capaian yakni 107,37% di triwulan I tahun 2021, meningkat menjadi 183,76% di periode yang sama tahun 2022, dan meningkat tiga kali lipat di tahun 2023 yakni 358,30%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pada periode yang sama dalam tiga tahun kinerja tim penindakan telah memenuhi target. Realisasi ini merupakan hasil kerja sama antara tim penindakan BBPOM di Jakarta bersama dengan tim penyidikan dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM dalam penanganan perkara tahun berjalan dan penyelesaian berkas perkara tunggakan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisa terhadap keberhasilan Tim Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni Menara (Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara). *Spreadsheet* ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring/luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya.

2. Koordinasi dan kerja sama dengan Tim Penyidikan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berjalan dengan optimal

Perubahan sistem kerja menjadi lebih *agile* (lincah) dan dinamis memungkinkan untuk tim penindakan bekerja sama dengan tim dari unit lain dengan tujuan untuk mengedepankan kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada triwulan pertama ini dilakukan uji coba kolaborasi antara tim penindakan BBPOM di Jakarta dengan tim penyidikan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM. Kolaborasi ini menghasilkan capaian berupa operasi penindakan terhadap sarana produksi kosmetik ilegal di wilayah Jakarta Utara dan ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan bersama.

Hingga berakhirnya triwulan pertama ini, proses penyelesaian berkas perkara masih berjalan dan dilakukan juga evaluasi kerja sama untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

3. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait yang semakin solid

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian pada triwulan pertama ini merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan

CJS yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat capaian penyerahan berkas (tahap 1) atas perkara tunggakan dan penyelesaian perkara tunggakan lainnya.

Selain itu, capaian kinerja di triwulan pertama juga merupakan hasil kerja sama antara tim penindakan dengan beberapa pihak untuk mengungkap peredaran obat dan makanan ilegal secara daring. Kerja sama lintas sektor ini dilakukan sejak kegiatan penelusuran dan pendalaman informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penindakan.

4. Pelaksanaan asistensi atau bantuan teknis oleh Deputi Bidang Penindakan yang lebih optimal

Salah satu upaya yang terus dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta dalam penanganan/penyelesaian perkara khususnya perkara tunggakan adalah melalui pelaksanaan asistensi/pemberian bantuan teknis oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan pertama ini, kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah kerja sama penindakan dengan tim penyidikan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM. Selain itu, upaya pencapaian kinerja ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis terhadap data hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal. Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, pengaduan masyarakat, dan juga dari akses informasi yang dimiliki. Selanjutnya kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi kegiatan ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan dalam perkara dan koordinasi dengan CJS yang lebih intensif	Sudah dilaksanakan	Koordinasi intens dengan CJS (Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Wassidik)	Akhir tahun 2023

24. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target TW I*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	-

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Balai Besar POM di Jakarta telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020 dan bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Oleh karenanya dilakukan berbagai upaya peningkatan, inovasi dan terobosan untuk dapat meningkatkan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomo 90 Tahun 2021, Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

b. *Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target tahun 2023*

Indeks RB diukur setiap tahun melalui penilaian Lembar Kerja Entitas dengan hasil yang disampaikan pada akhir tahun, sehingga belum tersedia data pada triwulan I tahun 2023.

25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target TW I*

Tabel 32. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan

oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:

- Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
- Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:

- Pemenuhan pengukuran (5%)
- Kualitas pengukuran (12,5%)
- Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:

- Pemenuhan pelaporan (3%)
- Kualitas pelaporan (7,5%)
- Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:

- Pemenuhan evaluasi (2%)
- Kualitas evaluasi (5%)
- Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

- Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
- Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
- Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta.

Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100

A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90

BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80

B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60

C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50

D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

b. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target tahun 2023

Pada triwulan I tahun 2023, nilai AKIP BBPOM di Jakarta belum terdapat realisasi dan capaian dikarenakan merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang dinilai pada akhir tahun 2023.

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target TW I

Tabel 33. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

b. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target tahun 2023

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di triwulan I tahun 2023 belum ada realisasi dan capaian, nilai akan muncul pada akhir tahun

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target TW I Tahun 2023

Tabel 35. persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) atau Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Pada triwulan I tahun 2023 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum terdapat realisasi dan capaian dikarenakan merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang dinilai pada akhir tahun 2023.

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

a. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target TW I tahun 2023

Tabel 36. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,5	3,3	132,00	Tidak dapat disimpulkan

SIPT merupakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yang digunakan oleh BBPOM di Jakarta untuk melaporkan hasil pemeriksaan sampel, pengujian sampel dan pemeriksaan sarana kepada Badan POM secara online. Cara perhitungan data SIPT sebagai berikut Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM. Indeks ini mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email, sharing folder, dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bagian/kelompok substansi maupun individu.

Dihitung Indeks pengelolaan data dan informasi UPT terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC (BPOM Command Centre)

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan oleh UPT yaitu SPIMKer (Data Keracunan) dan SIPT. Data kasus keracunan diinput oleh rumah sakit maupun oleh BBPOM di Jakarta melalui aplikasi SPIMKer. Kemudian data tersebut diverifikasi oleh petugas BBPOM Jakarta dengan timeline 30 HK dari tanggal input aplikasi. Cara perhitungan data Spimker sebagai berikut:

2. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Badan POM dengan kriteria sebagai berikut:

2,26 – 3 : Optima
 1,51 – 2,25 : Cukup
 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
 0 – 0,75 : Sangat Kurang

b. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target tahun 2023

Target indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal” TW I ini adalah 2,5 dengan realisasi indikator pada TW I adalah 3,3 dengan capaiannya yaitu 132% termasuk kriteria “Tidak dapat disimpulkan”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemantauan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta dilakukan oleh Tim IT yang memiliki *job description* yang jelas dan tercantum dalam SK Tim IT. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/ kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, yaitu:

- Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di BBPOM Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi
- Program pemanfaatan email *corporate* secara berkala oleh setiap pegawai dalam pelaporan status kehadiran (WFO/WFH) setiap minggu telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara optimal
- Pemanfaatan *sharing folder* dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk. Pemanfaatan *sharing folder* sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks 3.
- Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/ bulan dengan masing-masing minimal 101 *viewer*/berita aktual
- Verifikasi dan tindak lanjut petugas Aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal (3)
- Pendampingan Pusdatin dalam penggunaan fitur baru pada SIPT berkontribusi terhadap meningkatnya kompetensi
- Regionalisasi laboratorium mempengaruhi ketepatan waktu input sampling dan hasil uji pada SIPT, hal ini disebabkan diperlukan waktu tambahan untuk konsolidasi data

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

29. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan realisasi capaian TW I dengan target TW I

Tabel 37. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	77	64,54	83,82	Belum Memenuhi Ekspetasi

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. Capaian atas pengelolaan anggaran tersebut merupakan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) kementerian negara/lembaga yang meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan/ atau aspek konteks. Adapun capaian atas indikator kinerja anggaran merupakan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) kementerian negara/Lembaga

Nilai EKA kementerian negara/lembaga dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut: capaian *output*, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Bobot Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator yaitu:

Indikator	Bobot
Capaian Output	43,50%
Efisiensi	28,60%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,20%
Penyerapan Anggaran	9,70%

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA dapat dilihat pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). sedangkan nilai IKPA dapat diakses melalui Aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) atau



Gambar 24. Nilai EKA BBPOM Jakarta per 6 April 2023 pada aplikasi SMART DJA (<https://monev.kemenkeu.go.id/app2023/satker/dashboard>, 06-04-2023 11:32)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sistem Aplikasi: OMSPAN

No	Kode KPRM	Kode DA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Pelaksanaan di DPA	Penyelesaian Anggaran	Beban Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran LP dan TUP	Digunakan SPM				
1	175	003	402747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100,00	68,76	88,23	100,00	86,67	933,00	100,00	67,34	36,13	100%	94,13
					Beban	10	10	22	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	8,88	18,23	10,00	8,67	10,00	8,00	24,34			
					Nilai Rapel	64,40				96,00		57,34				

Gambar 25. Nilai IKPA BBPOM Jakarta triwulan I tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>, 06-04-2023 05:16:17)

b. Perbandingan realisasi capaian dengan target tahun 2023

Target indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta” pada triwulan I ini adalah 78 dengan realisasi indikator sebesar 59,97 dengan capaiannya yaitu 76,88% termasuk kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 93,7 dengan capaian tahun 2023 yaitu 64,00% jika disimpulkan sesuai dengan SK KaBPOM terbaru No.128 Tahun 2022 termasuk kategori “Tidak Efektif” diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada triwulan selanjutnya dan sampai dengan akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Variabel yang terkait dengan rendahnya nilai EKA terutama dipengaruhi dengan masih rendahnya capaian output dan efisiensi. Oleh karena itu, telah dilakukan upaya meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi.
2. Variabel yang terkait dengan nilai IKPA antara lain:
 - a. Penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual Non Belanja Pegawai tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai pada triwulan I. Terdapat satu tagihan yang terlambat karena kurangnya koordinasi

internal, sehingga telah diupayakan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pihak terkait untuk penyelesaian pembayaran.

- b. Terdapat deviasi deviasi yang cukup besar pada belanja modal bulan Februari dan Maret yang disebabkan percepatan realisasi pengadaan. Hal ini menyebabkan menurunnya/ berkurangnya nilai Halaman III DIPA. Untuk itu, telah dilaksanakan dilaksanakan penyesuaian Halaman III DIPA pada periode awal triwulan II.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang berpengaruh positif terhadap nilai kinerja anggaran adalah:

1. Pelaporan kepada KPPN secara tepat waktu terkait penyampaian data kontrak, LPJ, SPM
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan realisasi *output* secara berkala

3.2 Realisasi Anggaran

Pada triwulan I pagu anggaran DIPA 02 adalah Rp48.085.117.000 (empat puluh delapan milyar delapan puluh juta seratus tujuh belas rupiah) dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp6.899.774.388 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 14,35%.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang pencadangan anggaran/automatic adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023. maka total *automatic adjustment* Balai Besar POM di Jakarta sebesar Rp3.616.190.000,0 Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 31 Maret 2023 dengan pagu yang telah dikurangi *automatic adjustment* adalah sebesar 15,52% dari pagu Rp44.468.627.000

Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 18,02% dan belanja modal sebesar 17,49%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja barang 11,15%. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan I, berdasarkan pasal 9 PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja pegawai minimal 20%, belanja barang minimal 15%, dan belanja modal minimal 10%, masih terdapat selisih kurang sebesar - 1,98% pada belanja pegawai, -3,85% pada belanja barang, dan selisih lebih +7,49% pada belanja modal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	432747 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	PAGU	18,125,000,000	25,410,692,000	3,549,425,000	0	0	0	0	0	0	48,085,117,000
		REALISASI	3,446,043,941 (18.02%)	2,833,094,881 (11.15%)	620,835,566 (17.49%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6,899,774,388 (14.35%)
		SISA	15,678,956,059	22,577,597,119	2,928,789,434	0	0	0	0	0	0	41,185,342,612
GRAND TOTAL		PAGU	18,125,000,000	25,410,692,000	3,549,425,000	0	0	0	0	0	0	48,085,117,000
		REALISASI	3,446,043,941 (18.02%)	2,833,094,881 (11.15%)	620,835,566 (17.49%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	6,899,774,388 (14.35%)
		SISA	15,678,956,059	22,577,597,119	2,928,789,434	0	0	0	0	0	0	41,185,342,612

Gambar 26. Realisasi Belanja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan 31 Maret 2023

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- c. Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- d. Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran tersebut telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tabel 38. Nilai Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jakarta TW I

No		Target RO	Realisasi Volume RO	Persen Realisasi Output (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Kumulatif	Persen Realisasi Anggaran (%)	IE	TE	Capaian TE
1	Laporan Analisa Kejahatan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jakarta	14	7	50	701.090.000	244.229.913	34,84	1,44	0,44	92%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BBPOM di Jakarta	477	279	58,49	948.000.000	289.504.305	30,54	1,92	0,92	88%
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh BBPOM di Jakarta	35	40	114,29	131.484.000	14.000.000	10,65	10,73	9,73	75%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,55	55	519.350.000	201.271.440	38,75	1,42	0,42	92%
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jakarta	35	15	42,86	143.077.000	26.431.055	18,47	2,32	1,32	84%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	82.596.000	0	0,00	0	-1,00	75%
7	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	1	0,98	98	137.415.000	134.446.000	97,84	1,00	0,00	100%
8	Layanan Umum	1	0,49	49	1.319.525.000	465.162.548	35,25	1,39	0,39	95%
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,5	50	2.479.665.000	903.488.551	36,44	1,37	0,37	95%
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM JAKARTA	9	4,5	50	714.978.000	197.747.840	27,66	1,81	0,81	75%
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65	45,5	70	720.402.000	267.328.900	37,11	1,89	0,89	88%
12	Desa Pangan Aman	21	10,65	50,71	1.046.723.000	197.017.500	18,82	2,69	1,69	78%
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	3	2,5	83,33	110.081.000	56.740.600	51,54	1,62	0,62	90%
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM di Jakarta	6.300	3.530	56	2.460.540.000	1.162.611.544	47,25	1,19	0,19	100%
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM di Jakarta	919	452	49,18	851.980.000	88.171.345	10,35	4,75	3,75	75%
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM di Jakarta	2.239	1.115	49,8	1.329.007.000	268.237.121	20,18	2,47	1,47	80%
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BBPOM di Jakarta	125	125	100	26.660.000	9.789.500	36,72	2,72	1,72	78%
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM di Jakarta	333	177	53,15	275.704.000	68.397.460	24,81	2,14	1,14	86%
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	1.162	590	50,77	1.149.775.000	164.297.209	14,29	3,55	2,55	75%
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,5	50	3.345.578.000	1.454.908.745	43,49	1,15	0,15	100%
21	Layanan Perkantoran	1	0,4992	49,92	24.192.039.000	11.787.183.713	48,72	1,02	0,02	100%

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan input (anggaran) dan kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator pembangun sasaran strategis karena struktur anggaran dan indikator kinerja tidak selaras.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Triwulan I Tahun 2023 untuk 11 sasaran strategis yang diukur melalui 29 indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 12 (dua belas) indikator mencapai target dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"** ($100\% < x < 120\%$); 4 (empat) indikator dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"** yaitu ($80\% < x < 100\%$); 4 (empat) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **"Tidak dapat disimpulkan"**,
2. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"** yaitu diantaranya sasaran strategis. Hasil capaian sasaran strategis dapat ditarik kesimpulan **"Efektif"** adalah sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
 - 2) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
 - 3) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
3. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"** yaitu diantaranya sasaran strategis. Hasil capaian sasaran strategis dapat ditarik kesimpulan **"Kurang Efektif"** adalah sebagai berikut:
 - 1) Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
4. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria **"Tidak dapat disimpulkan"** adalah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
 - 2) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
 - 3) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta dengan jumlah anggaran BBPOM di Jakarta Realisasi Anggaran pada triwulan I pagu anggaran DIPA 02 adalah Rp48.085.117.000 (empat puluh delapan milyar delapan puluh juta seratus tujuh belas rupiah) dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp6.899.774.388 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 14,35%..

Secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja 2022 dapat dicapai.

4.2. Saran

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata Kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.
2. Monitoring dan evaluasi terus menerus akan dilakukan disisa triwulan tahun 2023
3. Melakukan optimalisasi kinerja agar semua target IKU tercapai

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.7

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Jakarta

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.8
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.33
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.55



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Jakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
48,085,117,000.00

Pihak Kedua

Jakarta, 20 Desember 2022
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

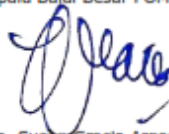
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	259.500.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	149.257.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	599.107.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	434.766.850,00
16.	Persentase UINIKH yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.3	10	24.2	37.5	37.5	38.3	38.3	38.3	39.2	65.8	95.8	79	76.029.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	4.697.413.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	20	25	36	42	49	56	67	78	87	96	88	703.121.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	17.5	26.25	32.5	41.25	47.5	50	52.5	60	80	28	1.059.366.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	436.125.900,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	265.726.500,00
22.	Persentase keberhasilan perindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		5	10	15	20	30	35	40	45	50	55	61	1.170.678.000,00
23.	Indeks RB UPT												84.4	318.155.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												81	54.019.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84.75	28.368.739.000,00

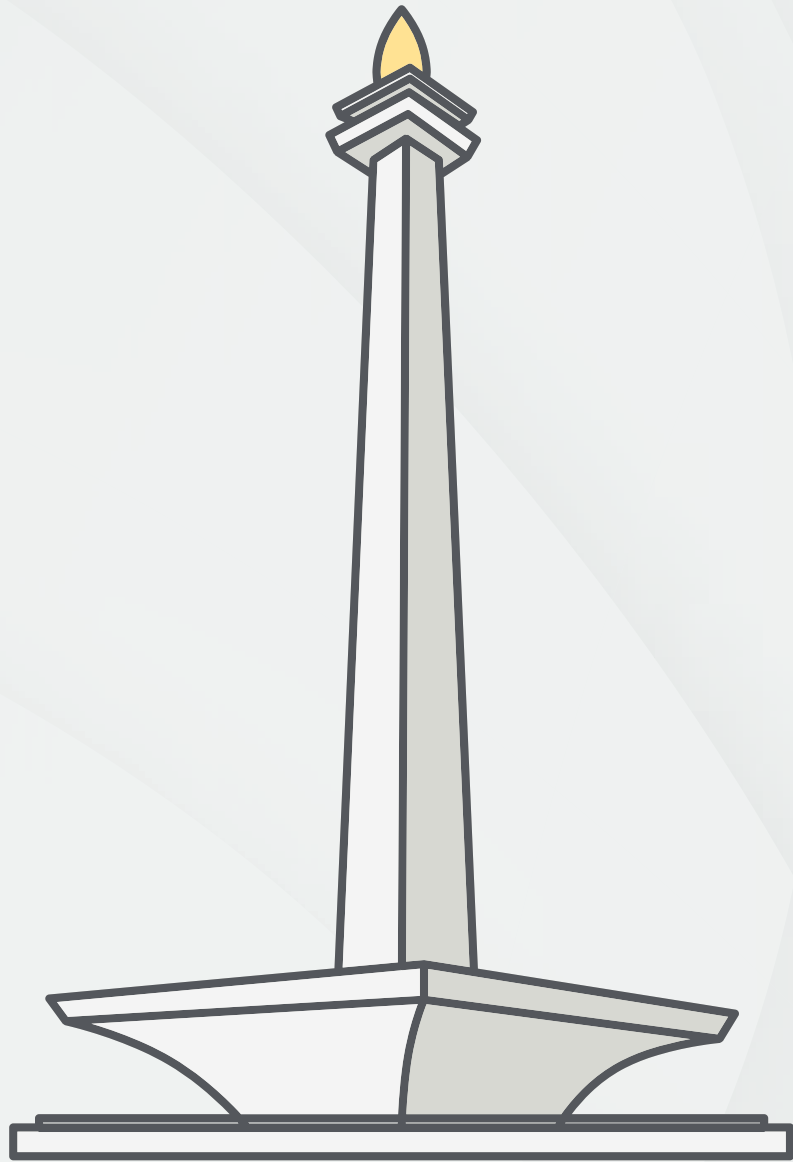
No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												87	5.877.061.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	73.925.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		76	77	78	79	80	82	84	86	88	90	93.7	28.600.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	15	40	55	65	75	80	85	100	100	4	106.629.000,00
Total													48.085.117.000,00	

Jakarta, 20 Desember 2022

Kepala Bajaj Besar POM di Jakarta



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.



**Jl. As'syafiiyah No.133, RT.3/RW.3,
Cilangkap-Jakarta Timur 13870**